

MODEL PENAWARAN AGREGAT DAN FUNGSI KERUGIAN TERHADAP PEREKONOMIAN SUMATERA UTARA

M. Umar Maya Putra¹⁾, Ami Dilham²⁾

¹⁾Entrepreneurship Development Program

²⁾Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara

umar_yazli@yahoo.com

Abstrak

Penawaran agregat (aggregate supply, AS) adalah hubungan antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dan tingkat harga. Karena Perusahaan yang menawarkan barang dan jasa memiliki harga yang fleksibel dalam jangka panjang tetapi harga kaku dalam jangka pendek, hubungan penawaran agregat bergantung pada horizon waktu. Kita perlu membahas dua kurva penawaran agregat yang berbeda. Kurva penawaran agregat jangka panjang (long run aggregate supply) LRAS dan kurva penawaran agregat jangka pendek (short run aggregate supply) SRAS. Kita perlu membahas bagaimana perekonomian melakukan transisi dari jangka pendek ke jangka panjang [5]. Guncangan penawaran pada perekonomian yang bisa mengubah biaya produksi barang serta jasa dan akibatnya, mempengaruhi harga yang dibebankan perusahaan kepada konsumen [5]. Guncangan yang terjadi dengan penawaran ini merupakan suatu fungsi kerugian yang akan terjadi dan bisa diaktualisasikan dengan kejadian yang terjadi di dalam masyarakat seperti hama yang mengancam, undang-undang perlindungan lingkungan baru, kenaikan agresivitas serikat pekerja, organisasi kartel minyak internasional.

Kata Kunci : *Penawaran Agregat, Fungsi Kerugian*

1. Pendahuluan

Dalam melihat penawaran agregat, bentangan dari kurva IS-LM menjadi suatu hal yang dilakukan untuk menciptakan stabilisasi. Kebijakan stabilisasi (*stabilization policy*) untuk mengacu tindak kebijakan yang mengurangi tekanan fluktuasi jangka pendek. Karena terjadi fluktuasi output dan kesempatan kerja di sekeliling tingkat alami jangka panjangnya, kebijakan stabilisasi memperkecil siklus bisnis dengan mempertahankan output dan kesempatan kerja sedekat mungkin pada tingkat alamiah [5].

Kondisi PDRB perkapita atas dasar harga berlaku dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 selalu mengalami peningkatan, yang merupakan suatu tanda perbaikan struktur pendapatan global masyarakat Sumatera Utara. Pada tahun 2008 PDRB perkapita baru mencapai Rp. 16,40 juta dan pada tahun 2012 telah mencapai Rp. 26,56 juta atau jika dikonversikan ke mata uang dolar Amerika Serikat dengan kurs Rp. 9.500 per dolar, maka PDRB perkapita masyarakat Sumatera Utara telah mencapai angka USD 2.796 [10].

Dengan demikian, untuk terbinanya suatu fluktuasi output dan kesempatan kerja secara agregat penawaran, mengalami peningkatan di Sumatera Utara terbukti dari perolahan dari PRDB yang dibuat dalam kinerja sektor riil. Sektor riil ini juga mampu menekan berbagai masalah yang terjadi dalam dilematika pembangunan ekonomi. Tingkat inflasi di Sumatera Utara secara umum juga kondisinya lebih baik dari nasional, di mana rata-rata capaian angka inflasi di bawah nilai 2 digit. Hal ini mengindikasikan bahwa peran pemerintah dan otoritas

moneter dalam hal ini Bank Indonesia Sumatera Utara melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) telah berjalan dengan baik.

Tabel. 1. PDRB Perkapita Tahun 2008-2012

Uraian	Tahun				
	2008	2009	2010	2011*)	2012**)
Nilai PDRB (Rp)	213,931,696.7 8	236,353,615.8 3	275,700,20 1	314,372,43 7	351,118,15 5
Jumlah Penduduk (Jiwa)	13,042,317.00	13,248,386.00	12,985,075	13.103.596	13,215,401
PDRB perkapita (Rp.juta/jiwa)	16.40	17.84	21.23	23,97	26,56

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2012 (data diolah)

Tabel. 2. Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2008-2012

INFLASI	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
Indonesia	11,06	2,78	6,96	3,79	4,30
Sumatera Utara	10,72	2,61	8,00	3,67	3,86

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2012 (data diolah)

Secara umum, laju inflasi Sumatera Utara masih dalam kondisi yang rendah (di bawah 2 digit) kecuali pada tahun 2008 yang mencapai 10,72%. Hal ini sebagai akibat kontraksi ekonomi di seluruh dunia, dan bahkan capaiannya selalu di bawah capaian nasional kecuali pada tahun 2010, untuk Sumatera Utara, capaian tingkat inflasinya di atas nasional, di mana capaian nasional sebesar 6,96%. Tetapi hal ini akan terus diupayakan untuk menstabilkannya dalam rangka tetap mempertahankan tingkat daya beli masyarakat.

Dengan Kondisi PDRB dan fluktuasi harga yang terjadi di Sumatera Utara, membuat kondisi dari sektor riil yang diwakilkan oleh TPID dan Bank Indonesia selaku otoritas moneter mampu membuat agregat penawaran menjadi lebih baik dan dapat menstabilkan kondisi perekonomian serta mampu meminimalisir guncangan (*shock*) yang terjadi dalam ekonomi makro yang mampu membuat pasar menjadi tidak kondusif dan meminimalisir dari fungsi kerugian.

2. Kajian Pustaka

Model Klasik menjelaskan bagaimana perekonomian berperilaku dalam jangka panjang, kita turunkan kurva penawaran agregat jangka-panjang dari model klasik. Jumlah output yang diproduksi tergantung pada jumlah modal dan tenaga kerja yang tetap serta pada teknologi yangtersedia. Untuk menunjukkan hal ini, kita menulis:

$$Y = F(\bar{K}, \bar{L}) \\ = \hat{Y}$$

Menurut model klasik, output tidak bergantung pada tingkat harga. Untuk menunjukkan bahwa output sama untuk semua tingkat harga sedangkan selama priode waktu yang panjang, harga-harga adalah fleksibel, kurva penawaran agregat adalah vertikal, dan perubahan permintaan agregat mempengaruhi tingkat harga tetapi tidak output [5].

Output agregat yang direncanakan (AE) dalam perekonomian sederhana yang hanya terdiri dari dua pelaku ekonomi, yakni sektor rumah tangga dan perusahaan, Output Agregatnya adalah penjumlahan konsumsi dan investasi [3].

$$AE = C + I$$

Agregate Expenditure = Konsumsi + Investasi

Gambar 1. Jumlah Output Agregat

Perolehan pendapatan rumah tangga bersumber dari penyerahan input tenaga kerja, modal, tanah dan sebagainya. Perolehan pendapatan yang diperoleh rumah tangga adalah untuk konsumsi setelah pendapatan dikurangi pajak dan memutuskan berapa yang harus ditabung sehingga perolehan pendapatan rumah tangga tersebut dinamakan dengan pendapatan disposibel (*disposable income*) yaitu $Y - T$ atau pendapatan setelah dikurangi pembayaran pajak. Dalam struktur Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga yang meliputi komponen makanan dan non makanan tergolong besar yaitu 56,3 dari total PDB pada tahun 2010 dan 2011 kontribusi rumah tangga Indonesia dalam struktur PDB sebesar 54,2 [2].

Pembentukan modal tetap bruto berupa bangunan/konstruksi, nilainya dihitung dengan menjumlahkan nilai seluruh keluaran (output) sektor konstruksi yaitu nilai bahan bangunan/konstruksi ditambah ongkos angkut dan margin perdagangan serta biaya lain berupa jasa serta biaya primer. Nilai keluaran sektor bangunan yang berasal dari perbaikan-perbaikan ringan/kecil tidak dihitung sebagai pembentukan modal. Sedangkan untuk pembentukan modal tetap bruto berupa mesin-mesin dan alat perlengkapan, nilainya dihitung dengan menjumlahkan nilai mesin/alat yang bersangkutan ditambah ongkos angkut dan margin perdagangan serta biaya lainnya [2].

2.1. Produk Domestik Regional Bruto Sumatera Utara

Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Sumatera Utara adalah serangkaian usaha kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam usaha pembangunan nasional yang berkelanjutan dan tepat sasaran dilakukan perencanaan pembangunan yang baik dan didukung oleh sarana dan prasarana perekonomian suatu wilayah. Kondisi perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari pendapatan regional. Dalam menghitung pendapatan regional ini hanya dipakai konsep domestik. Ini menunjukkan bahwa seluruh nilai tambah yang ditimbulkan oleh berbagai sektor/lapangan usaha di suatu wilayah dihitung tanpa memperhatikan kepemilikan faktor produksi. Dengan demikian PDRB menunjukkan kemampuan suatu wilayah dalam menghasilkan pendapatan/ balas jasa kepada faktor-faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan produksi di wilayah tersebut [3].

2.1.1 Metode Langsung

Hasil perhitungannya mencakup seluruh produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh wilayah tersebut. Pemakaian metode ini dilakukan melalui tiga pendekatan.

1. Pendekatan Produksi

PDRB merupakan jumlah Nilai Tambah Bruto (NTB) atau nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi didalam suatu wilayah/region dalam suatu periode tertentu. Biasanya satu tahun, sedangkan NTB adalah Nilai Produksi Bruto (NPB / output) dari barang dan jasa dikurangi dengan seluruh biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi.

2. Pendekatan pendapatan

PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi disuatu wilayah atau *region* dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. Berdasarkan pengertian tersebut maka NTB adalah Jumlah dari upah dan gaji,

sewa tanah, bunga modal dan keuntungan, semuanya belum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam pengertian PDRB ini termasuk pula komponen penyusutan dan pajak tak langsung.

3. Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah jumlah seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok dan ekspor netto di dalam suatu wilayah atau region dalam periode tertentu, biasanya satu tahun. Dengan metode ini perhitungan NTB bertitik tolak pada penggunaan akhir dari barang dan jasa yang diproduksi.

2.1.2 Metode Tidak Langsung atau Alokasi

Menghitung nilai tambah suatu kelompok ekonomi dengan mengalokasikan nilai tambah nasional kedalam masing-masing kelompok kegiatan ekonomi pada tingkat regional. Sebagai indikator yang paling besar pengaruhnya atau erat kaitannya dengan produktivitas kegiatan ekonomi tersebut. Pemakaian masing-masing metode pendekatan sangat tergantung pada data yang tersedia. Pada kenyataannya, pemakaian pada kedua metode tersebut akan saling menunjang satu sama lain, karena metode langsung akan mendorong peningkatan kualitas data daerah, sedangkan metode tidak langsung merupakan koreksi dan pembandingan bagi data daerah.

2.2 Koordinasi Kebijakan Moneter dan Fiskal

Laju inflasi di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor permintaan (*demand pull*) namun juga faktor penawaran (*cost push*), maka agar pencapaian sasaran inflasi dapat dilakukan dengan efektif, kerjasama dan koordinasi antara pemerintah dan BI melalui kebijakan makroekonomi yang terintegrasi sangatlah diperlukan. Sehubungan dengan hal tersebut, di tingkat pengambil kebijakan, Bank Indonesia dan Pemerintah secara rutin menggelar Rapat Koordinasi untuk membahas perkembangan ekonomi terkini. Di sisi lain, Bank Indonesia juga kerap diundang dalam Rapat Kabinet yang dipimpin oleh Presiden RI untuk memberikan pandangan terhadap perkembangan makroekonomi dan moneter terkait dengan pencapaian sasaran inflasi. Koordinasi kebijakan fiskal dan moneter juga dilakukan dalam penyusunan bersama Asumsi Makro di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dibahas bersama di DPR. Selain itu, Pemerintah juga berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam melakukan pengelolaan Utang Negara [7].

Di tataran teknis, koordinasi antara Pemerintah dan BI telah diwujudkan dengan membentuk Tim Koordinasi Penetapan Sasaran, Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) di tingkat pusat sejak tahun 2005. Anggota TPI, terdiri dari Bank Indonesia dan departemen teknis terkait di Pemerintah seperti Departemen Keuangan, Kantor Menko Bidang Perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Perdagangan, Departemen Pertanian, Departemen Perhubungan, dan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Menyadari pentingnya koordinasi tersebut, sejak tahun 2008 pembentukan TPI diperluas hingga ke level daerah. Ke depan, koordinasi antara Pemerintah dan BI diharapkan akan semakin efektif dengan dukungan forum TPI baik pusat maupun daerah sehingga dapat terwujud inflasi yang rendah dan stabil, yang bermuara pada pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan berkelanjutan [7].

2.3. Model Dasar Independensi Bank Sentral

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang independen (pasal 4 UU No 23 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 3 tahun 2004). Independensi Bank Indonesia dimulai sejak diberlakukannya Undang-Undang tersebut juga mengikuti *trend* Bank

Sentral di negara-negara lain (Inggris th 1997), Jepang (tahun 1998) Jerman (tahun 1949). Bank Indonesia hanya memiliki tujuan tunggal (single objective) yakni mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, sedangkan tugasnya 3 (tiga) yakni (i) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, (ii) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dan (iii) Mengatur dan mengawasi bank. Tugas pengawasan bank akan dilakukan oleh lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang [8].

Independensi Bank Indonesia merupakan hal yang relatif baru, sering disalah artikan bahwa independen seperti “negara dalam negeri”, lembaga yang berdiri kaku/tidak tersentuh oleh lembaga lain. Padahal sesungguhnya pengertian independen ini adalah dalam bidang tugasnya sebagaimana disebutkan diatas yakni bidang moneter, sistem pembayaran dan perbankan, bukan lembaga yang tidak boleh disentuh. Independensi Bank Indonesia diartikan sebagai berlebihan sehingga sejak menyandang gelar independen, maka sejak itu pula Bank Indonesia selalu dikritisi, dipermasalahkan. Padahal kalau dilihat wewenang Bank Indonesia pada era UU sebelumnya, wewenangnya begitu luas termasuk dalam menyalurkan BLBI dan KLBI. Independensi dalam menjalankan tugasnya tersebut bukan berarti berdiri sendiri. Bank Indonesia masih tetap harus berkoordinasi dengan pemerintah dan atau pihak-pihak terkait. Namun stigma independensi yang terlanjur diartikan melingkupi segala-galanya, maka “upaya-upaya” untuk mengurangi status tersebut secara tersirat dilakukan oleh pihak-pihak tertentu [8].

Ada tiga alasan mengapa bank sentral harus independen, *pertama*, teori pilihan publik menjelaskan bahwa bank sentral mendapatkan tekanan politik dari pemerintah untuk membiayai defisit anggaran pemerintah melalui kebijakan uang yang cenderung longgar (Eijffinger, 1997). *Kedua*, saat otoritas fiskal dominan, otoritas moneter tidak akan bisa untuk mengendalikan defisit anggaran pemerintah, sehingga penawaran uang menjadi bersifat endogen. Hal ini dimungkinkan saat bank sentral tidak independen (Sargent and Wallace, 1981 dikutip dari Eijffinger, 1997). *Ketiga*, terdapat masalah ‘ketidak konsistenan waktu atau *time inconsistency* saat kebijakan tersebut tidak lagi optimal untuk merespon rencana yang sebenarnya [1].

Salah satu langkah untuk mengatasi dilemma diatas adalah dengan memilih dan mengangkat bank sentral yang konservatif. Akan tetapi, penunjukan bank sentral yang konservatif ini masih menjadi perdebatan dikarenakan banyak penelitian yang menemukan hasil yang berbeda. Beberapa peneliti mengatakan bahwa independensi bank sentral dapat menciptakan inflasi yang rendah, sedangkan yang lainnya menemukan bahwa tidak ada korelasi antara *Central Bank Independence* (CBI) dan inflasi. Pada umumnya, korelasi negatif antara index CBI legal dan inflasi ditemukan pada negara-negara industri dimana hal ini tidak signifikan pada negara-negara berkembang. Di sisi lain, pergantian gubernur bank sentral sebagai indikator informal CBI umumnya berkorelasi positif terhadap inflasi pada negara-negara berkembang tapi tidak signifikan pada negara-negara industri atau negara maju [1].

2.4 Prediksi Kondisi Makro Ekonomi Indonesia 2015

Optimisme responden terhadap pertumbuhan ekonomi 2015 meningkat. Ekonomi Indonesia diperkirakan meningkat 5.50% (yoy), meningkat dengan realisasi pertumbuhan 5.02% (yoy) pada tahun 2014 dan berada pada kisaran proyeksi Bank Indonesia sebesar 5,4 – 5.8% (yoy). Ekspektasi pertumbuhan ekonomi tahun 2015, antara lain dipengaruhi oleh pertumbuhan investasi yang membaik dan peningkatan daya beli masyarakat yang mendorong kuatnya konsumsi sejalan dengan terkendalinya tekanan inflasi. Laju Inflasi tahun 2015 diperkirakan sebesar 4.72% (yoy) lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2014 sebesar 8.36% (yoy) dan berada pada sasaran inflasi tahun 2015 sebesar 4%. Menurunnya harga komoditas internasional, terkendalinya kenaikan harga, akibat penyesuaian *administered prices* dan ketersediaan barang yang mencukupi kebutuhan nasional ditenggerai menjadi faktor

pendorong membaiknya inflasi tahun 2015. Namun demikian beberapa faktor yang ditengarai member tekanan terhadap laju inflasi tahun 2015 antara lain kenaikan harga minyak dunia dan pengurangan kembali subsidi untuk energy (BBM, tariff tenaga listrik, *liquefied petroleum gas*/LPG). Sejalan dengan masih tingginya tekanan yang bersumber dari faktor eksternal, perkiraan nilai tukar terhadap dolar AS tahun 2015 terkoreksi menjadi Rp. 13. 234 per dolar melemah dibandingkan dengan realisasi nilai tukar pada tahun 2014 Rp. 12. 440 per dolar [8].

Tabel. 3. Perkiraan Makro EKonomi Indonesia 2015 dan 2016

No.	Indikator Ekonomi	Realisasi 2014 ¹⁾	Perkiraan Tahun 2015		Perkiraan Tahun 2016	Asumsi Makro APBN P 2015 ²⁾	Proyeksi PDB dan Sasaran Inflasi 2015 ³⁾
			Survei Q IV 2014	Survei Q I 2015	Survei Q I 2015		
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%. yoy)	5,02	5,26 - 5,50 (mpe: 5,37)	≥ 5,40 (mpe: 5,50)	≥ 5,40 (mpe: 5,64)	5,7	5,4 - 5,8
2.	Inflasi (%. yoy)	8,36	7,01 - 7,50 (mpe: 7,35)	≤ 6,00 (mpe: 4,72)	≤ 6,00 (mpe: 4,99)	5,0	4 ± 1
3.	Nilai Tukar (Rp/USD)	12.440	12.501-13.000 (mpe: 12.719)	> 13.000 (mpe: 13.234)	> 13.000 (mpe: 13.388)	12.500	-

Keterangan:

1) Angka GDP sementara

2) Kementerian Keuangan RI

3) Tinjauan Kebijakan Moneter Bank Indonesia, Maret 2015

Secara umum kondisi inflasi yang diperkirakan 4,72% (yoy) menjadi 7,15% (yoy) mengakibatkan suatu permasalahan yang meneggangu kondisi agregat penawaran yang dapat membuat investor menjadi lebih cemas untuk memarkirkan dananya di Indonesia. Jika dilihat perkembangan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada 1 Juni 2015 mengalami penurunan 0.05% menjadi 5.213,82. Fungsi kerugian yang terjadi yang terjadi juga dikaibatkan kondisi pelemahan rupiah yang terus mengganggu sektor perdagangan di pasar uang. Pemerintah juga perlu memberikan berbagai stimulus untuk membuat kondisi makro ekonomi Indonesia menjadi lebih baik dan imbas *trickle down effect* kepada daerah sekitar [9].

3. Metode Penelitian

3.1. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam pembuatan paper Model Penawaran Agregat dan Fungsi Kerugian Sumatera Utara menggunakan Sumber Sekunder. Sumber Sekunder adalah merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen [6]. Dokumen yang dihasilkan bisa melalui Data BPS dan Data dari website www.bi.go.id yang memiliki data terstruktur untuk membuat hasil yang efektif dalam penentuan kebijakan.

3.2. Analisis Data

Analisis data yang akan diambil dengan menggunakan Statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasinya. Penelitian yang dilakukan pada populasi (tanpa diambil sampelnya) jelas akan menggunakan statistik deskriptif dalam analisisnya.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Analisis Sisi Penawaran Ekonomi Regional Sumatera Utara

Sisi penawaran , relatif stabilnya pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada triwulan disokong oleh akselerasi kinerja kategori pertanian yang tidak terlepas dari faktor musiman,

yaitu panen raya tanaman bahan pangan. Demikian pula dengan kategori pertambangan dan penggalian yang juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan melalui produksi tambang emas di Tapanuli. Namun perlambatan yang terjadi kepada kategori industri pengolahan, kotruksi serta PBE menahan laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara ke level yang lebih tinggi di triwulan laporan [10].

Tabel. 4. Pertumbuhan Ekonomi Sumut Dari Sektor Penawaran

Penawaran	2014		2015
	IV*	2014	I**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.19	4.37	5.95
Pertambangan dan Penggalian	4.43	5.33	12.25
Industri Pengolahan	0.32	2.97	-0.02
Pengadaan Listrik, Gas	6.26	3.71	-6.30
Pengadaan Air	6.84	6.04	9.70
Konstruksi	8.53	6.79	8.29
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.46	6.94	4.93
Transportasi dan Pergudangan	6.35	5.71	5.39
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.50	6.48	9.21
Informasi dan Komunikasi	4.74	7.23	5.81
Jasa Keuangan	6.69	2.84	3.32
Real Estate	7.93	6.59	4.94
Jasa Perusahaan	7.46	6.76	7.24
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.19	6.92	5.32
Jasa Pendidikan	0.00	6.37	1.15
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.56	7.00	6.37
Jasa lainnya	6.08	7.04	6.15
PDRB	4.81	5.23	4.78
Akselerasi			
Stabil			
Melambat			

Sumber: Data BPS diolah

Dari data dapat terlihat bahwa dengan kebijakan yang terjadi secara makro ekonomi bahwa sektor yang mengalami akselerasi seperti pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, pengadaan air, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, administrasi pemerintahan, jasa pendidikan secara umum mempengaruhi penawaran agregat dalam jangka pendek yang menopang ekonomi Sumatera Utara, namun dengan kondisi fluktuasi perekonomian yang mengalami penyesuaian terjadi suatu hal yang mengalami perlambatan seperti industri pengolahan, pengadaan listrik, konstruksi, perdagangan besar, transportasi, jasa keuangan, real estate, jasa perusahaan, jasa kesehatan akan menyebabkan suatu dampak kerugian dan perlu diperhatikan perkembangan di masa depan agar tidak mengalami penurunan yang menyebabkan perlambatan di perekonomian Sumatera Utara. Hal ini juga perlu menjadi perhatian pemerintah Sumatera Utara selaku komando di sektor riil bekerjasama dengan Bank Indonesia dengan secara independen menjadi komando di sektor moneter.

Penawaran agregat dalam perubahan permintaan agregat mempengaruhi tingkat harga tetapi tidak output untuk kategori pertanian dengan panen raya dan beberapa sektor terkait sehingga akumulasi dari pengeluaran dalam perdagangan komoditas pertanian mampu untuk menstabilkan dari perekonomian Sumatera Utara. Untuk meminimalisir fungsi kerugian dalam beberapa sektor seperti pengolahan, perlu didukung sokongan investasi dan infrastruktur yang memadai untuk tetap meningkatkan kondisi stabilnya konsumsi rumah tangga.

4.2. Perkembangan Sektor Perbankan, Stabilitas Sistem Keuangan dan Sistem Pembayaran Sumatera Utara

Kinerja perbankan triwulan I 2015 relatif stabil. Kinerja perbankan Sumatera Utara ditopang oleh peningkatan pertumbuhan kredit sehingga level intermediasi perbankan meningkat. Hal ini tercermin dari *Loan Deposit To Ratio* (LDR) perbankan yang naik dari

93,01% menjadi 93,61%. Namun peningkatan resiko yang tercermin dari meningkatnya *Non Performing Loans* (NPL) yang naik 2,49 % menjadi 2,72% perlu menjadi perhatian lebih dan dijaga agar tidak mengganggu intermediasi perbankan maupun pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara di masa mendatang. Di sisi lain ketahanan di sistem keuangan baik di sektor korporasi, UMKM maupun rumah tangga masih terjaga cukup baik meskipun kecenderungan resiko yang semakin tinggi. Kredit korporasi di tiga sektor utama Sumatera Utara cenderung tumbuh namun resiko NPL tinggi. Di sektor UMKM, porsi penyaluran kredit UMKM terhadap total kredit pada triwulan I 2015 mencapai 28% dari total kredit, meningkat dari triwulan berikutnya [7].

Naiknya NPL terhadap nilai kredit, merupakan suatu dampak dari pola konsumsi masyarakat yang perlu menjadi perhatian. Koordinasi antara sektor riil dan moneter dalam menjalankan fungsi intermediasi, harus menjadi pemikiran sehingga tidak mengalami fungsi kerugian. Dampak seperti kredit perumahan, sepeda motor lebih sering terjadi khususnya dalam menghadapihari besar keagamaan. Peran koordinasi inilah yang perlu ditingkatkan untuk menjaga kestabilan perekonomian Sumatera Utara.

4.3. Fokus Pengembangan Ekonomi Daerah Sumatera Utara

Pemerintah Sumatera Utara telah merumuskan 9 prioritas pembangunan tahun 2015 untuk menunjang perekonomian Sumatera Utara, yaitu [8]:

1. Peningkatan kehidupan beragama, penegakan hukum, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan.
3. Peningkatan aksesibilitas dan pelayanan kesehatan.
4. Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan, penerapan teknologi, inovasi dan kreatifitas daerah.
5. Peningkatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, Mitigasi Bencana dan Pelestarian Lingkungan Hidup mendukung Daya Saing Perekonomian.
6. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan.
7. Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Miskin.
8. Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Daya Saing Produk Pertanian, Kelautan dan Perikanan.
9. Mendukung dan Mendorong Kebijakan Nasional Daerah.

Dengan melihat prioritas yang utama, pemerintah Sumatera Utara memfokuskan kegiatan yang utama di poin 2 dan 5. Infrastruktur dan Pendidikan merupakan suatu komponen dasar dalam peningkatan penawaran agregat untuk mendukung beberapa sektor basis seperti pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, pengadaan air, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, administrasi pemerintahan. Konsep model penawaran agregat jangka panjang dengan stabilisasi dari infrastruktur dan pengembangan pola pendidikan yang lebih mendukung kepada konsep kemandirian sejalan dengan peningkatan ekonomi kerakyatan.

Konsep infrastruktur dan pendidikan memang sangat berperan dalam meningkatkan sektor penawaran di Sumatera Utara, namun yang penting dalam konsep pembangunan ekonomi, perlu dilakukan akselerasi yang cepat dalam pengadaan barang dan jasa yang merupakan komponen infrastruktur baik segi kontrak dan juga percepatan terhadap dinamika perekonomian yang mempengaruhi penawaran. Pelemahan nilai tukar, tentunya bisa menjadi penghambat dan perlu dilakukan pengkajian secara sistematis terhadap program yang akan dilaksanakan.

Potensi pelemahan nilai, perusahaan eksportir umumnya menyatakan tidak terpengaruh oleh hal tersebut. Problem yang lebih kosen pelaku usaha adalah lesunya permintaan dunia dan anjloknya harga komoditas di pasar internasional. Pelemahan nilai tukar yang seharusnya menguntungkan eksportir pada prakteknya tidak berpengaruh kepada kinerja perusahaan. Perusahaan eksportir lebih mengharapkan nilai tukar yang stabil dibandingkan dengan nilai tukar yang terdeprisasi. Untuk mengurasi resiko nilai tukar tersebut, salah satu jalan yang diambil perusahaan adalah mengambil utang dari luar negeri sebagai bentuk dari *natural hedging* [8].

Triwulan II 2015, hampir seluruh perusahaan di Sumut yang operasionalnya menggunakan valuta asing mengalami penurunan maupun produksi. Khusus perusahaan importir, penjualan maupun volume produksi pada triwulan II 2015diperkirakan turun sebsar 20% (yoy). Sementara untuk keseluruhan tahun 2015, pelaku usaha memperkirakan terjadi penurunan sebesar 13% dari sisi penjualan maupun volume. Hal ini disebabkan mahalnya, bahan baku impor sebagai dampak dari kenaikan BBM April yang lalu [8].

Walaupun *natural hedging* merupakan suatu cara yang lebih aman, namun jika terjadi gagal bayar, maka akan menyebabkan kondisi gagal bayar dari perusahaan, sehingga pola yang dilakukan Bank Indonesia untuk menstabilkan kredit dari luar negeri dengan memperkuat berbagai syarat dan ketentuan dalam aturan peminjaman korporasi dan mewaspadai praktek dari *money laundering* yang sewaktu-waktu terjadi sehingga menjadikan transaksi yang dilakukan berdampak pada kegiatan kriminalisasi.

5. Kesimpulan

1. Kondisi perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari pendapatan regional. Sektor yang mengalami akselerasi pada PDRB Sumatera Utara seperti pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, pengadaan air, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, administrasi pemerintahan, jasa pendidikan secara umum mempengaruhi penawaran agregat dalam jangka pendek yang menopang ekonomi Sumatera Utara.
2. Kondisi fluktuasi perekonomian yang mengalami perlambatan seperti industri pengolahan, pengadaan listrik, konstruksi, perdagangan besar, transportasi, jasa keuangan, real estate, jasa perusahaan, jasa kesehatan akan menyebabkan suatu dampak kerugian dan perlu diperhatikan perkembangan di masa depan agar tidak mengalami penurunan yang menyebabkan perlambatan di perekonomian Sumatera Utara
3. Kinerja perbankan Sumatera Utara ditopang oleh peningkatan pertumbuhan kredit sehingga level intermediasi perbankan meningkat. Hal ini tercermin dari *Loan Deposit To Ratio* (LDR) perbankan yang naik dari 93,01% menjadi 93,61%. Namun peningkatan resiko yang tercermin dari meningkatnya *Non Performing Loans* (NPL) yang naik 2,49 % menjadi 2,72% dan perlu menjadi perhatian agar tidak terjadi fungsi kerugian yang mendasar.
4. Program pemerintah Sumatera Utara dengan memfokuskan pembenahan infrastruktur dan pendidikan perlu didukung oleh kebijakan selaras dan memiliki akselerasi yang cepat dengan kondisi nilai tukar rupiah serta stabilisasi dari kenaikan BBM sehingga tidak terjadi masalah penwaran dari perekonomian baik jangka pendek dan jangka panjang.
5. Natural Hedging yang dilakukan oleh perusahaan perlu diperhatikan dengan cermat sehingga tidak menjadi masalah terhadap sisi pembayaran jangka panjang dan tidak berdampak terhadap kriminalisasi yang mengakibatkan *money laundering* yang bisa menciptakan fungsi kerugian.

Referensi

- [1] Andriani, Y., & Gai, P., (2013), The Effect of Central Bank Independence on Price Stability: The Case of Indonesia, *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* , 369.
- [2] Hasanah, E. U., & Sunyoto, D., (2012), *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, CAPS, Jakarta.
- [3] Kunangwangsih, T. P., & A. P. (2007), *Aspek Dasar Ekonomi Makro di Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta.
- [4] Murdadi, B., (2012), Independensi Bank Indonesia Di Persimpangan Jalan, *Value Added*, Vol. 9, No.1
- [5] N, G. Mankiw., (2007), *Makro Ekonomi Edisi Keenam* Erlangga, Jakarta.
- [6] Sugiyono., (2009), *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, CV. Alfabeta, Bandung.
- [7] www.bi.go.id, (n.d.), *Koordinasi-kebijakan*, Retrieved May 12, 2015.
- [8] www.bi.go.id, (n.d.), *Peran BI*, Retrieved May 12, 2015.
- [9] www.kontan.co.id, *Berita Ekonomi*, Retrieved May 12, 2015.
- [10] www.pemkomedan.go.id, Retrieved May 12, 2015.